

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Politik Pertanian ” Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya Terhadap Konversi Lahan Pertanian”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peraturan daerah Kota Tasikmalaya mengenai tata ruang wilayah yang memperbolehkan alih fungsi lahan pertanian kedalam lahan non-pertanian yang menyebabkan turunnya produktivitas padi akibat berkurangnya lahan pertanian. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak pembangunan non pertanian yang terjadi di Kota Tasikmalaya, hal ini membuat para petani yang ada di Kota Tasikmalaya menjadi gusar karena lahan pertanian yang semakin menipis, hal ini sangat berdampak besar khususnya pada sektor pertanian, selain itu juga Kota Tasikmalaya sudah menerapkan sistem yang disebut zona hijau, zona hijau sendiri berarti tempat hutan, lahan pertanian berada dan hal ini tidak akan bisa dijadikan sebagai bangunan apapun, meskipun begitu lahan pertanian di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya terus berkurang. Adanya lahan pertanian yang dijadikan bangunan seperti halnya café, mall, hotel, dan lainnya membuat para petani bertanya-tanya, kenapa Pemerintah memberikan izin kepada para pengembang pembangunan untuk mendirikan bangunan diatas lahan pertanian, sementara hal ini membuat lahan pertanian terus berkurang drastis.

Tulisan ini mengkaji tentang penerapan dari kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap konversi lahan pertanian dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori politik agraria, serta teori sistem politik sebagai teori pendukung.

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya alih fungsi lahan yang terjadi dikarenakan adanya peraturan tata ruang wilayah mengenai alih fungsi lahan pertanian, dan juga adanya factor-faktor lain pendorong terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan setiap tahun lahan pertanian dan produksi pangan berkurang.

Penelitian ini, menggunakan metode penelian kualitatif. Didukung oleh pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari empat pokok yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan validitas data.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Sistem Politik, Lahan Pertanian, Alih Fungsi Lahan.